



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG
PELIMPAHAN DELEGASI ATAU MANDAT KEWENANGAN UNTUK
MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA
DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa kepastian hukum diperlukan dalam setiap proses administrasi kepegawaian khususnya terkait pelimpahan delegasi menandatangani keputusan atau mandat kewenangan untuk dan/atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan percepatan pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian diperlukan pelimpahan delegasi atau mandat kewenangan untuk menandatangani keputusan dan/atau surat-surat lainnya di bidang kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan adanya beberapa perubahan regulasi bidang kepegawaian maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Delegasi atau Mandat Kewenangan Untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Delegasi Atau Mandat Kewenangan Untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Delegasi atau Mandat Kewenangan Untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG PELIMPAHAN DELEGASI ATAU MANDAT KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Delegasi atau Mandat Kewenangan Untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 93) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG
PELIMPAHAN DELEGASI MENANDATANGANI KEPUTUSAN ATAU MANDAT
KEWENANGAN UNTUK DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

PEJABAT YANG MENERIMA DELEGASI ATAU MANDAT KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN
DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA DI BIDANG KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

NO.	KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS / PPPK GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	a. Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS/CPPPK		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD - Kepala BKD	- Golongan III - Golongan I dan Golongan II - CPPPK	
	b. Surat Perintah Tugas CPNS/CPPPK		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
	c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas CPNS/PPPK		- Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja	- Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing
2	a. Perjanjian Kerja PPPK		- Sekretaris Daerah		
	b. Pemutusan Hubungan Kerja PPPK		- Sekretaris Daerah		
	c. Pemberhentian PPPK		- Sekretaris Daerah		
3	Petikan Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS		- Sekretaris Daerah	- Golongan III	- Kecuali bagi CPNS yang Tewas, atau Cacat karena Dinas
			- Kepala BKD	- PNS Golongan I dan II	
4	Petikan Keputusan Pengangkatan PPPK		- Kepala BKD	PPPK	
5	Berita Acara Sumpah/Janji PNS		- Kepala BKD	- Semua Golongan	

NO.	KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS / PPPK GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6	Keterangan Uraian Tugas untuk : a. Tugas Belajar b. Keterangan Belajar c. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	- Kepala Perangkat Daerah/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - Kepala BKD		- Semua golongan ruang - Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing - Bagi PNS pada perangkat daerah setingkat Administrator
7	Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS		- Kepala BKD	- Gol. Ruang I/a s/d III/d	- Kecuali Kenaikan Pangkat Anumerta bagi PNS yang dinyatakan tewas dan Kenaikan Pangkat Pengabdian
8	Petikan Keputusan Pengangkatan/Pemindahan/ Pemberhentian dalam/dari Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- JPTP - Administrator - Pengawas	
9	Keputusan Pengangkatan/Pemindahan/ Pemberhentian dalam/dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas		- Sekretaris Daerah		
10	Petikan Keputusan Pengangkatan/Pemindahan/ Pemberhentian dalam/dari Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas		- Kepala BKD		
11	Administrasi Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan a. Berita Acara Pelantikan dan Sumpah Jabatan		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- JPTP - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama - Administrator - Pengawas - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya kebawah	
			- Kepala BKD	- Jabatan Fungsional Kete-rampilan - Kepala Sekolah - Kepala Puskesmas	

NO.	KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS / PPPK GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	b. Surat Pernyataan Pelantikan		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- JPTP - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama - Administrator - Pengawas - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya kebawah - Jabatan Fungsional Keterampilan - Kepala Sekolah - Kepala Puskesmas	
	c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- JPTP - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama - Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya ke bawah - Administrator - Pengawas - Jabatan Fungsional Ketrampilan - Kepala Sekolah - Kepala Puskesmas	
12	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrasi		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- JPTP - Administrator - Pengawas	
13	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan Fungsional		- Kepala BKD	- Semua jenjang jabatan	
14	Keputusan Penetapan pengangkatan/pemindahan/pemberhentian dalam dan dari JF/pengangkatan kembali	- Sekretaris Daerah		- JF Ahli Muda ke bawah - JF Ketrampilan	

NO.	KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS / PPPK GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
15	Petikan Keputusan Penetapan pengangkatan/pemindahan/pemberhentian dalam dan dari JF/penetapan pengangkatan kembali		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- JF Ahli utama - JF Ahli Madya ke bawah - JF Ketrampilan	
16	Surat Pemberitahuan Tentang Kenaikan Gaji - Berkala (SPTKG)	- Kepala BKD	- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Gol. Ruang IV/c s/d IV/e - Gol. Ruang I/a s/d IV/b - PPPK	
17	Surat Keputusan Tentang Kenaikan Gaji - Berkala				
18	Surat Pemberitahuan Penghentian Pembayaran Gaji		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
19	Surat Rekomendasi a. Pemindahan antar kabupaten/kota dalam Provinsi		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
	b. Pemindahan antar kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
	c. Surat Permintaan/Persetujuan Pindah		- Sekretaris Daerah	- Semua golongan ruang	
20	Keputusan Pemindahan Jabatan Fungsional dan Pelaksana a. Pemindahan antar Perangkat Daerah b. Pemindahan antar Unit Kerja/UPT dalam Lingkungan Perangkat Daerah		- Kepala BKD - Kepala BKD	- Semua jenjang/golongan - Semua jenjang/golongan	
21	Surat Perintah Penugasan Pelatihan a. Pelatihan Kepemimpinan		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Diklatpim Tk.II) - Pelatihan Kepemimpinan Administrator & Pengawas (Diklatpim Tk.III dan IV)	
	b. Pelatihan Teknis dan Pelatihan Fungsional		- Kepala BKD	- Semua Golongan Ruang	

NO.	KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS / PPPK GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
22	Surat Tugas Belajar		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- S2 dan S3 - S1 kebawah	
23	Surat Keterangan Belajar		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- S2 dan S3 - S1 kebawah	
24	Surat Keterangan Perolehan Ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS		- Kepala BKD	- Semua jenjang/strata	
25	Surat rekomendasi seleksi administrasi dan akademik Tugas Belajar		- Kepala BKD	- Semua jenjang/strata	
26	Administrasi Izin Perkawinan/Perceraian PNS a. Keputusan Pemberian/Penolakan Izin Perkawinan dan Perceraian		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Golongan IV - Golongan I s/d III	
	b. Surat Keterangan Melakukan Perceraian		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- Golongan IV - Golongan I s/d III	
27	Cuti ASN : a. Cuti Tahunan	- Kepala Perangkat Daerah		- Semua golongan	- Di lingkungan perangkat daerah masing-masing
	b. Cuti Besar c. Cuti Sakit d. Cuti Melahirkan e. Cuti Karena Alasan Penting (CKAP) f. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	- Sekretaris Daerah		- JPTP dan Administrator yang berkedudukan sebagai kepala perangkat daerah	
			- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	- Cuti Besar untuk melahirkan anak ke-4 dan seterusnya. - Cuti diluar tanggungan negara, cuti yang dilaksanakan ke luar negeri dan semua jenis cuti yang diajukan oleh sekretaris daerah merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian untuk

NO.	KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS / PPPK GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
					memberikan/menanggihkan/menolak. - Persetujuan pemberian semua jenis cuti berdasarkan verifikasi dari BKD
28	Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat		Sekretaris Daerah Kepala BKD	JPTP Semua Jabatan Kecuali JPTP	
29	Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pidana/tidak pernah dipidana penjara		Sekretaris Daerah Kepala BKD	JPTP Semua Jabatan Kecuali JPTP	
30	Surat Laporan tentang peristiwa yang mengakibatkan ASN tewas atau cacat	- Kepala Perangkat Daerah		- Semua golongan ruang	- Di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
31	Surat Ketetapan Kecelakaan kerja untuk Perawatan	- Kepala BKD		- Semua golongan ruang	- Bagi PNS yang mengalami kecelakaan kerja
32	Izin Pencalonan Kepala Desa/Perangkat Desa		- Kepala BKD	- Semua golongan ruang	
33	a. Pelaksana Tugas		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- JPTP dan Administrator - Pengawas, Kepala Sekolah Kepala Puskesmas	
	b. Pelaksana Harian		- Sekretaris Daerah - Kepala BKD	- JPTP - Administrator, Pengawas, - Kepala Sekolah - Kepala Puskesmas	
34	SK penolakan/pemberian izin cerai PNS/PPPK		Kepala BKD		

NO.	KEPUTUSAN DAN/ATAU SURAT-SURAT LAINNYA	PEJABAT YANG DIBERI DELEGASI KEWENANGAN	PEJABAT YANG DIBERI MANDAT KEWENANGAN	BAGI CPNS / PNS / PPPK GOL.RUANG/JENJANG JABATAN/PENDIDIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
35	Surat Penunjukan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin ASN (Untuk pelanggaran disiplin yang diancam hukuman disiplin sedang atau berat)	Kepala Perangkat Daerah		Semua ASN kecuali JPTP dan Administrator	
			Sekretaris Daerah	JPTP dan Adminitrator	
36	Pengesahan/Legalisasi atas fotocopy dokumen kepegawaian:		- Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada BKD	- Semua golongan ruang	- Dikecualikan untuk keperluan tertentu sesuai yang dipersyaratkan

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

)